



**PERHENTIAN  
MENGAYOMI  
KORUPSI**

# **LAPORAN HASIL PEMANTAUAN TREN PENINDAKAN KORUPSI TAHUN 2022**

**Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW  
Februari 2023**

[www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)

# Latar Belakang

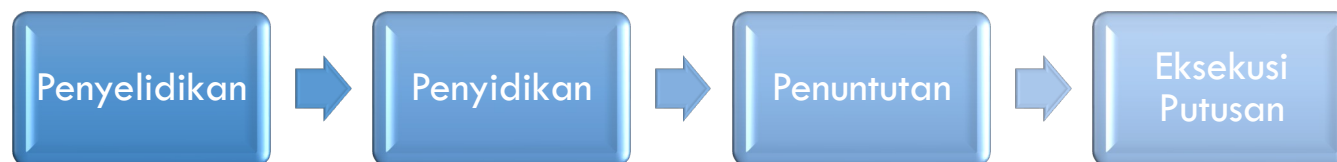
- Korupsi seperti penyakit kronis yang sulit untuk disembuhkan → jumlah kasus korupsi dari tahun ke tahun seringkali meningkat
- Poin Indeks Persepsi Korupsi (2022) Indonesia anjlok dari 38 menjadi 34 poin dan menduduki peringkat 110 dari 180 negara
- Salah satu indikator yang menyebabkan penurunan IPK adalah penegakan hukum antikorupsi terbukti belum efektif dalam mencegah dan memberantas korupsi



Presiden Jokowi dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2021 di Gedung KPK, Jakarta (foto: dok/Biro Setpres RI).

# Latar Belakang

- Demi menjaga *check and balances*, peran serta masyarakat menjadi penting



- Peran serta masyarakat sendiri telah diatur melalui sejumlah regulasi., di antaranya Pasal 13 angka 1 United Nation Convention Against Corruption dan Pasal 41 UU Tipikor. Serta, peraturan pelaksanaannya di PP 43/2018
- Regulasi tersebut menegaskan bahwa masyarakat dapat menyampaikan saran dan pendapat kepada APH mengenai penanganan kasus tindak pidana korupsi



\*Sumber: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022, Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK

Total anggaran yang dialokasikan untuk  
penindakan kasus korupsi  
(penyelidikan/penyidikan) seluruh APH

**Rp 449 Miliar**

**2.772 Kasus**

Target penindakan APH pada  
tahun 2022

# Tujuan Pemantauan

- Memberikan gambaran mengenai penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK sepanjang tahun 2022
- Mendorong transparansi dan akuntabilitas data penanganan kasus korupsi pada setiap institusi penegak hukum

# Metode

- Tabulasi data;
  - Data informasi berasal dari media dan/atau situs resmi penegak hukum;
  - Periode pemantauan: 1 Januari – 31 Desember 2022;
- Olah data;
- Penilaian Kinerja APH didasarkan pada DIPA TA 2022
- Data komparasi;
- Analisis deskriptif.



# Keterbatasan Pemantauan

1. Sumber data yang diperoleh ICW, sebagian besar berasal dari sumber sekunder
2. Perbedaan terminologi perkara yang digunakan aparat penegak hukum dengan yang digunakan dalam laporan penelitian ini

# Temuan Umum

**Kasus**



**579 Kasus**

**Tersangka**



**1.396 Orang**

**Kerugian Negara**



**Rp42,747 Triliun**

**Suap**



**Rp693 Miliar**

**Pungutan Liar**



**Rp11,9 Miliar**

**Pencucian Uang**



**Rp955 Miliar**





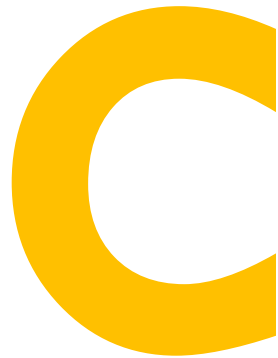
# Penilaian Kinerja Penindakan Kasus Korupsi

$$\frac{\text{Penindakan kasus yang terpantau}}{\text{Target penindakan kasus}} \times 100\% = \% \text{ kasus yang ditangani}$$

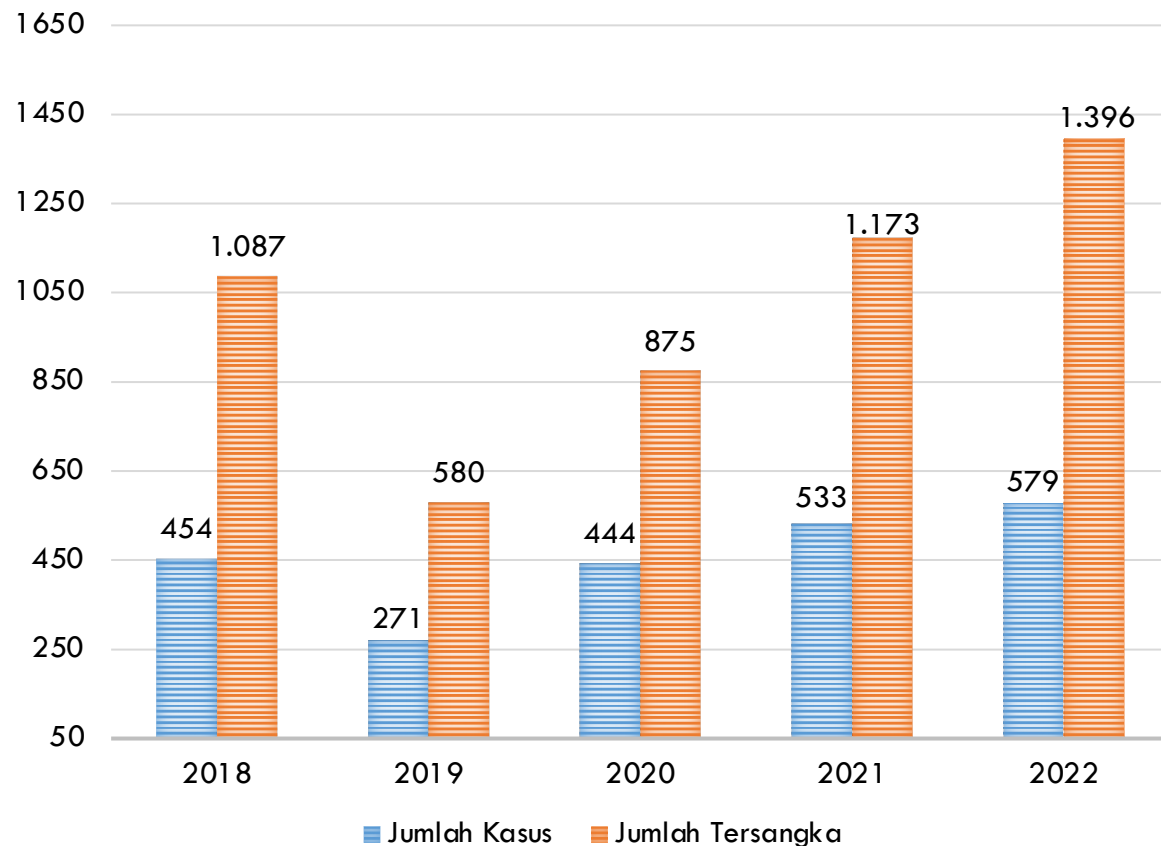
| No | % Kasus yang ditangani | Peringkat | Keterangan   |
|----|------------------------|-----------|--------------|
| 1  | 81-100                 | A         | Sangat baik  |
| 2  | 61-80                  | B         | Baik         |
| 3  | 41-80                  | C         | Cukup        |
| 4  | 21-40                  | D         | Buruk        |
| 5  | 0-20                   | E         | Sangat buruk |



Dari target sebanyak 2.772 perkara tindak pidana korupsi pada Tahun 2022, keseluruhan Aparat Penegak Hukum terpantau hanya mampu merealisasikan sebanyak 1.396 perkara atau sekitar 50 persen. Sehingga kinerja penindakan kasus korupsi hanya mendapatkan nilai:



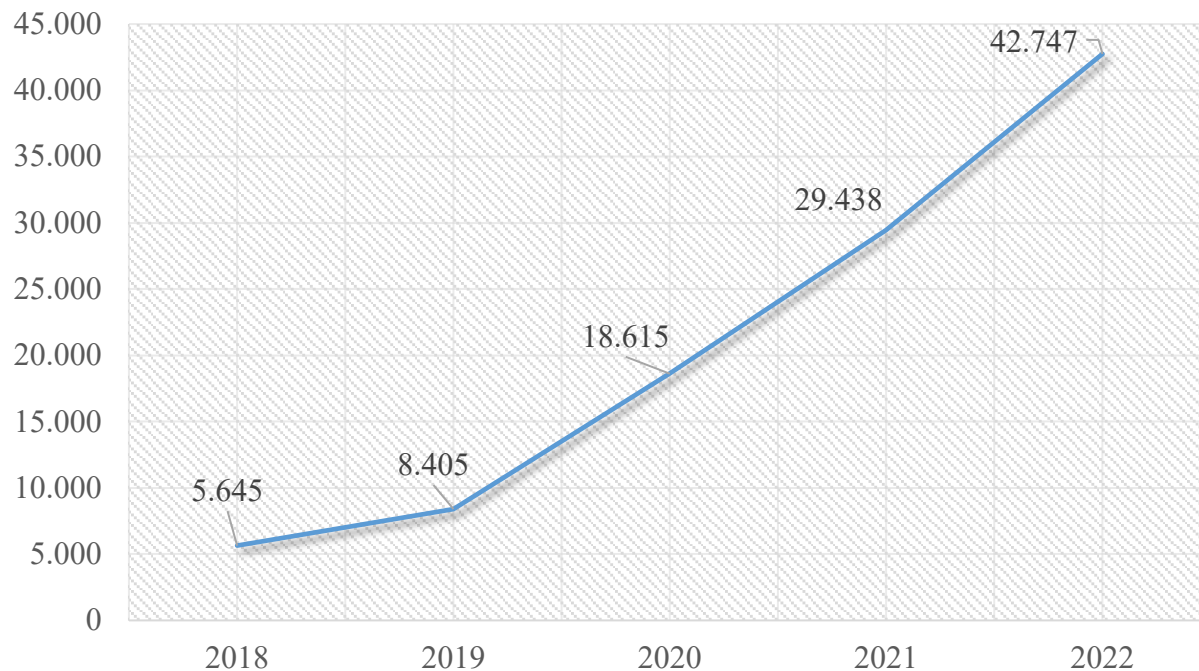
# Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018-2022



- Penindakan kasus korupsi mengalami peningkatan dari segi jumlah kasus maupun tersangka;
- Meski terbilang cukup baik, namun setiap APH perlu memastikan agar penanganan kasus tidak berhenti pada proses penyidikan, melainkan hingga penuntutan hingga eksekusi putusan;
- APH juga perlu didorong untuk melakukan pengembangan kasus hingga menasar aktor-aktor intelektual yang diduga turut terlibat

# Potensi Kerugian Keuangan Negara Tahun 2018-2022

Potensi Kerugian Negara Tahun 2018-2022 (Rp)



- Potensi nilai kerugian secara konsisten terus meningkat setiap tahun;
- Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah setiap tahun semakin buruk dari segi pengawasan, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- Hal ini akan sangat mempengaruhi arah pembangunan nasional dan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat;
- Pengelolaan keuangan negara perlu didorong untuk lebih transparan, profesional, dan bertanggung jawab

# Lima Kasus Penyumbang Kerugian Negara Terbesar Selama Tahun 2022

## Begini Cara Kejagung Hitung Kerugian Negara Rp 18 T dalam Kasus Ekspor CPO

kumparanNEWS

31 Agustus 2022 18:03 - waktu baca 5 menit



Kejaksaan Agung, Jakarta. Foto: Kejaksaan Agung RI

## Korupsi Garuda untuk Pengadaan Bombardier dan ATR Rugikan Negara Rp 8,8 Triliun

Reporter:  
Muhammad Hendartyo

Editor:  
Francisca Christy Rosana

Senin, 27 Juni 2022 14:17 WIB



Home > Nasional > Hukum Kriminal

## Kronologi Korupsi Ekspor Rugikan Negara Rp2,6 T yang Dikuak Kejagung

CNN Indonesia

Jumat, 07 Jan 2022 10:11 WIB

Bagikan :



Ilustrasi aktivitas ekspor-impor di pelabuhan Indonesia. (ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA)

Home [Rakyat Memilih](#) [Politik](#) [Hukum](#) [Hankam](#) [Humaniora](#) [Indeks](#)

## Dugaan Korupsi Waskita Beton Rugikan Negara Rp2,5 Triliun

Erfan Maaruf

Selasa, 26 Juli 2022 - 22:52 WIB



Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan kerugian negara kasus dugaan korupsi PT Waskita Beton Precast mencapai Rp2,5 triliun. Foto/dok.SINDOnews

detikjateng Home [Berita](#) [Sepakbola](#) [Hukum & Kriminal](#) [Budaya](#) [Wisata](#) [Kuliner](#) [Jogja](#)

## Kerugian Negara Rp 104,1 T dalam Korupsi Surya Darmadi, Ini Rinciannya

Tim detikNews - detikJateng

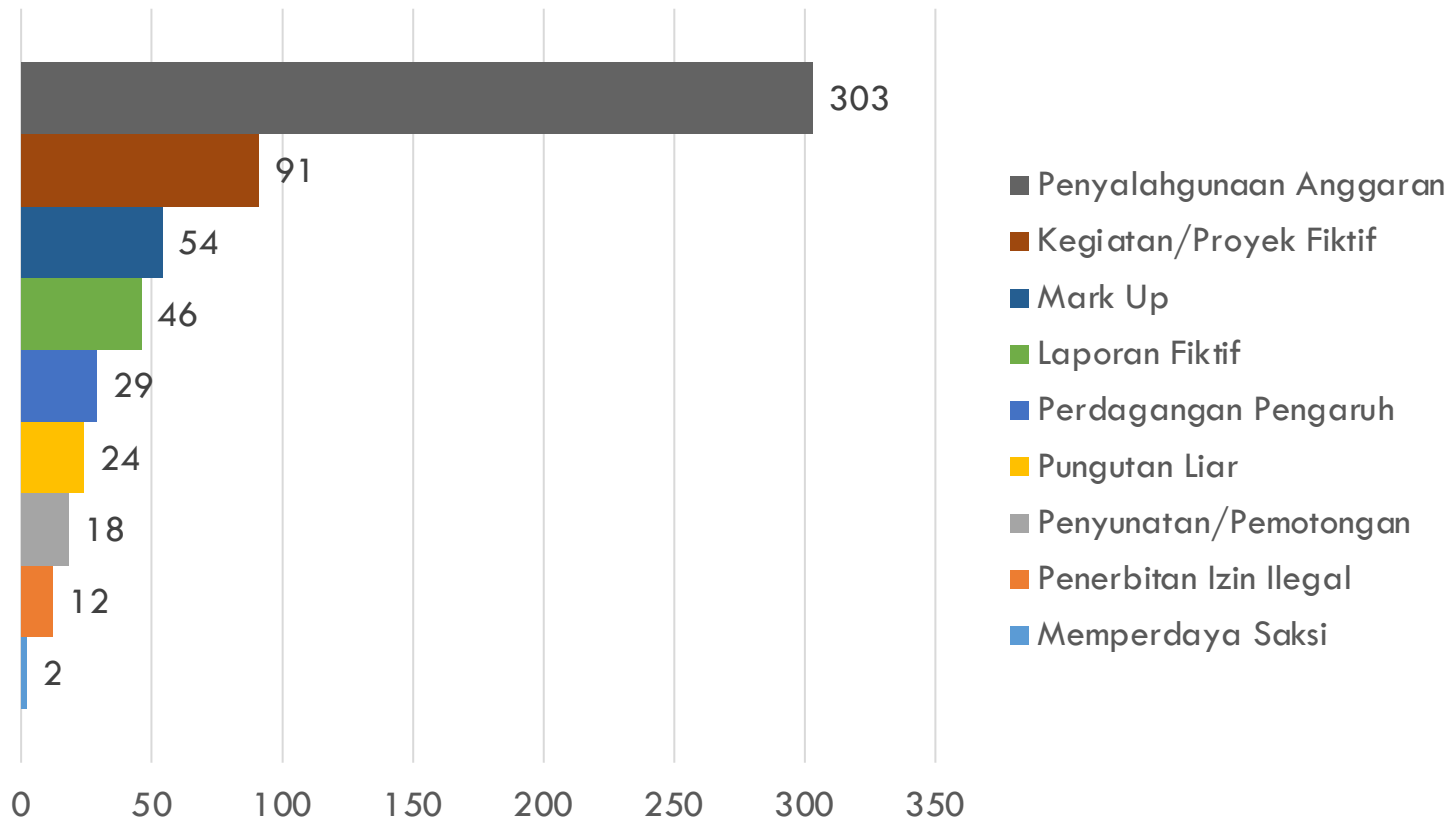
Selasa, 30 Agu 2022 14:15 WIB



Jaksa sita uang dari kasus korupsi Surya Darmadi. (Foto: Adrial Akbar/detikcom)



# Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Modus Tahun 2022



- Sejalan dengan temuan sebelumnya, modus penyalahgunaan anggaran menjadi modus yang paling dominan digunakan oleh pelaku kasus korupsi;
- Modus lainnya yang sering digunakan adalah *mark up* dan kegiatan/proyek fiktif
- Ketiga modus tersebut seringkali ditemukan dalam kasus korupsi pengadaan barang/jasa dan pengelolaan anggaran pemerintah
- Dari 579 kasus yang berhasil diungkap, 250 kasus atau 43% diantaranya berdimensi PBJ

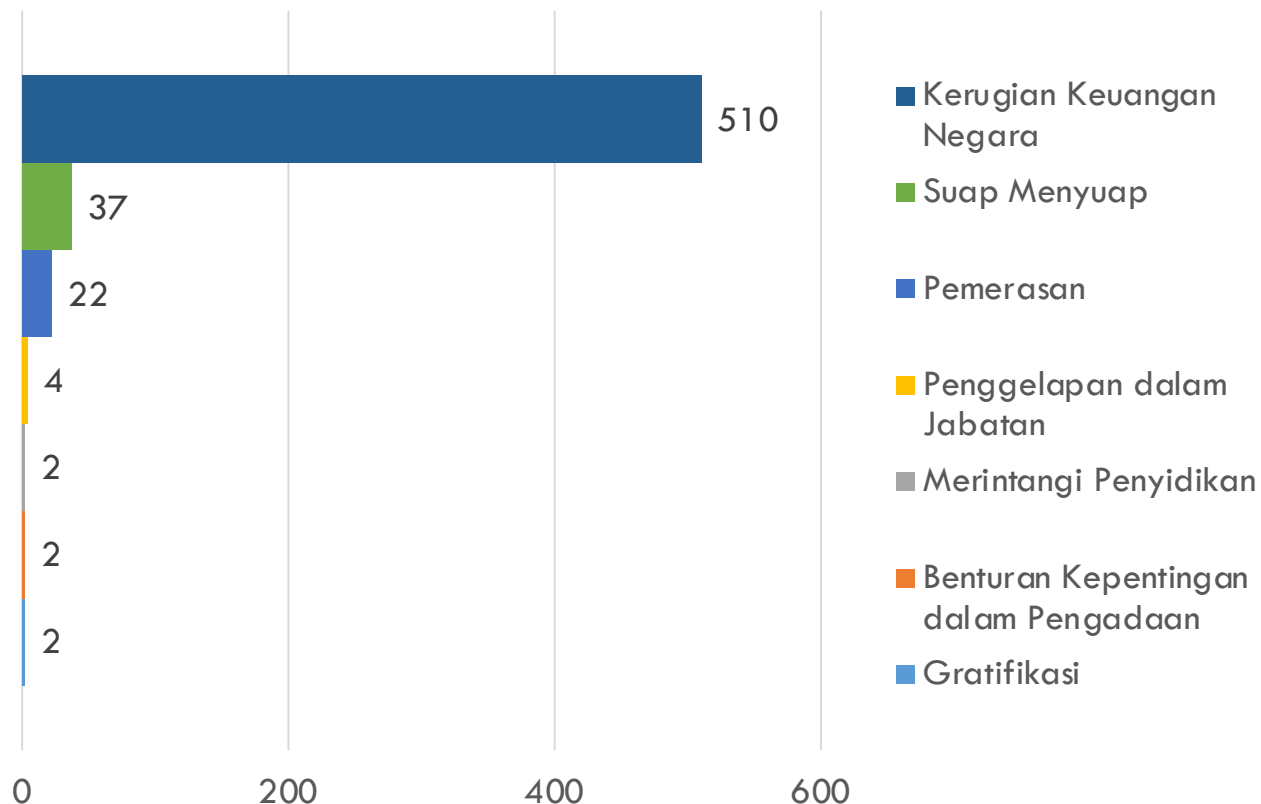


# ***Modus Trading in Influence***

- ICW mengidentifikasi modus perdagangan pengaruh, hasilnya tahun 2022 terdapat 19 kasus korupsi menggunakan modus ini;
- Salah satu contoh kasusnya adalah perkara dugaan suap pengusulan dana PEN untuk Kabupaten Kolaka Timur
- Namun, secara formal, *Trading in Influence* sendiri yang merupakan norma UNCAC belum dikriminalisasi dalam hukum nasional Indonesia
- Meskipun pelaku korupsi yang berlatang belakang penyelenggara negara yang melakukan perdagangan pengaruh masih dapat dijerat pasal suap, bagaimana dengan swasta?



# Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Jenis Korupsi Pada Tahun 2022



- Tercatat sepanjang tahun 2022, APH paling banyak mengusut korupsi dengan jenis Kerugian Negara (Pasal 2/3 UU Tipikor)
- Dari 579 kasus, APH tercatat hanya tiga belas kasus yang turut dikenakan pasal pencucian uang,
- Menunjukkan komitmen rendah APH dalam upaya pengembalian aset hasil kejahatan dari hasil tindak pidana korupsi
- Sinergi antara PPATK dengan APH → Seringkali laporan transaksi mencurigakan tidak di-follow up oleh penegak hukum → salah satu contohnya 12 hasil analisis PPATK sejak tahun 2017 terkait transaksi mencurigakan Gubernur Papua, Lukas Enembe



## PPATK Dorong RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Uang Kartal

POLITIK

5 April 2022, 14:43:03 WIB

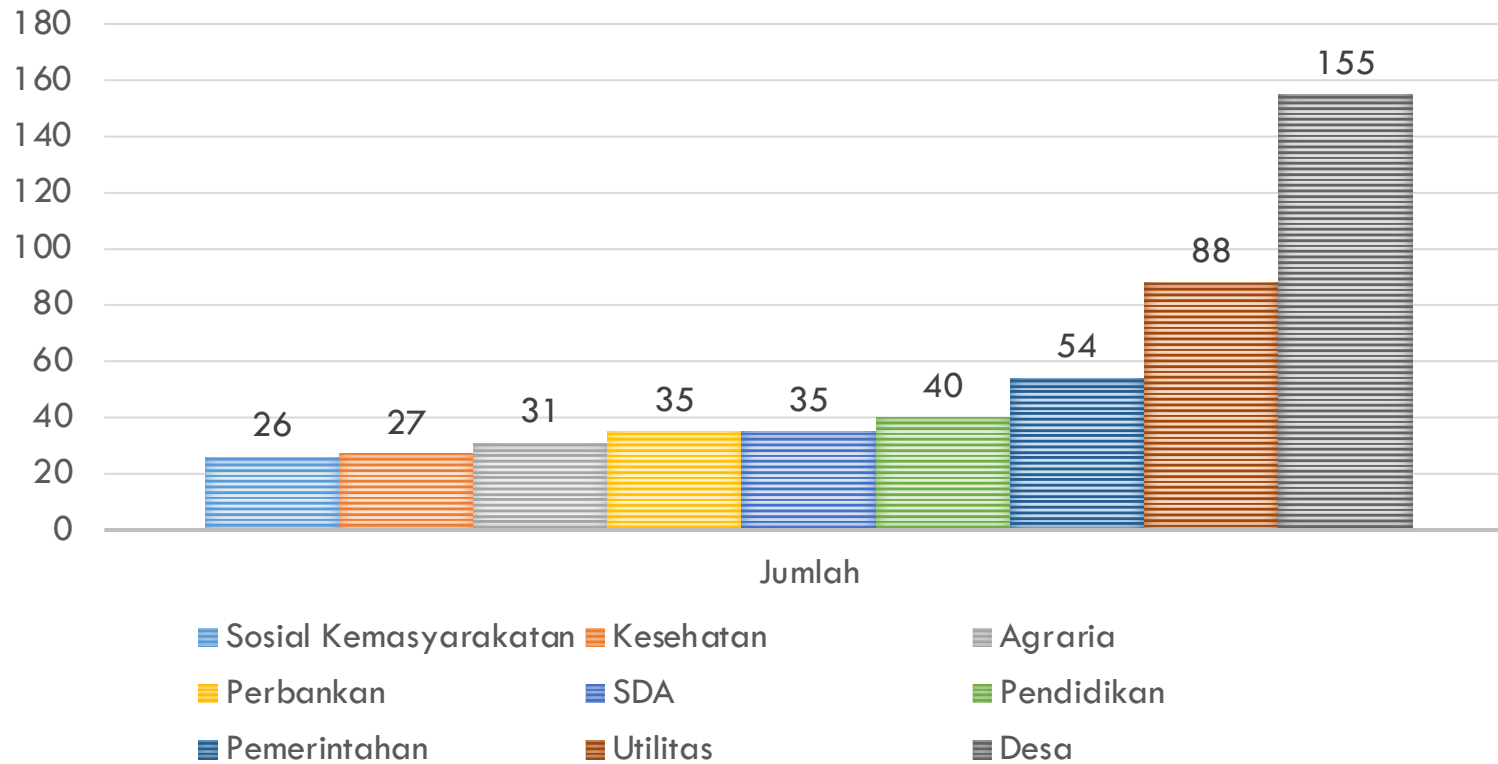


Guna menunjang kinerja APH, Pemerintah dan DPR harus segera memprioritaskan proses legilasi atas regulasi yang pro terhadap pemberantasan korupsi seperti:

1. RUU Perampasan Aset;
2. RUU Pembatasan Transaksi Uang Tunai;
3. Revisi UU Tindak Pidana Korupsi.



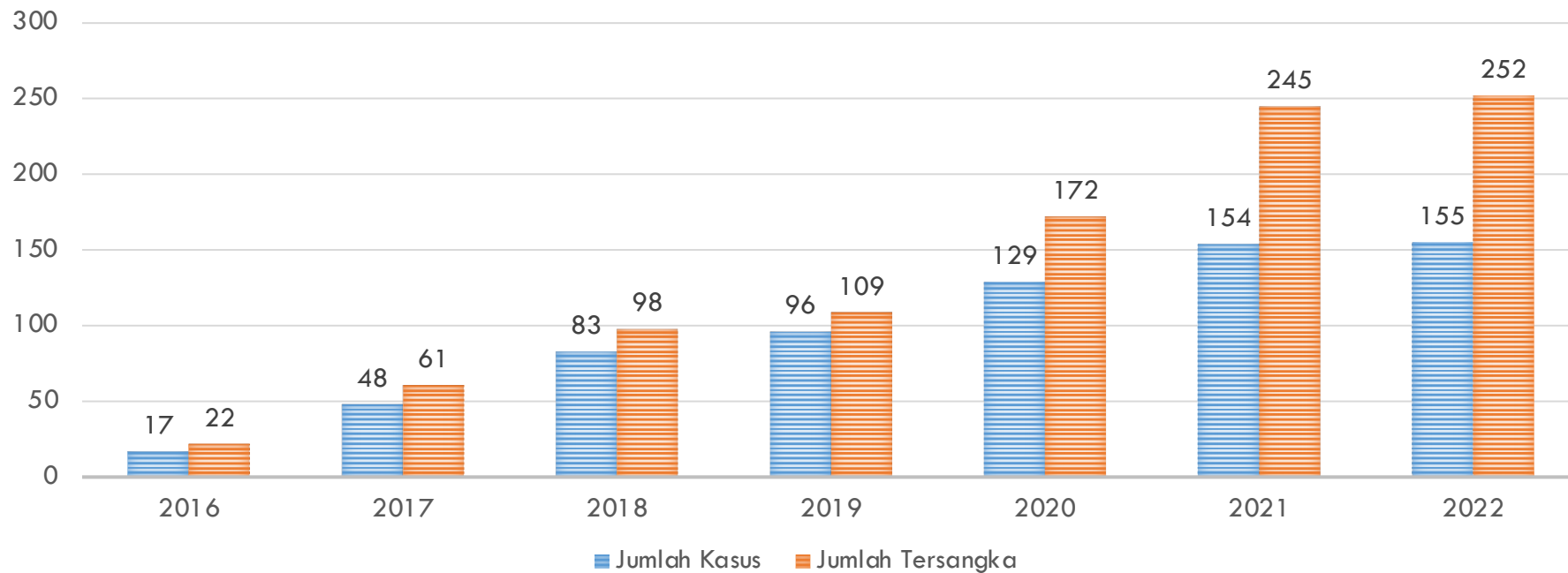
# Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor Pada Tahun 2022



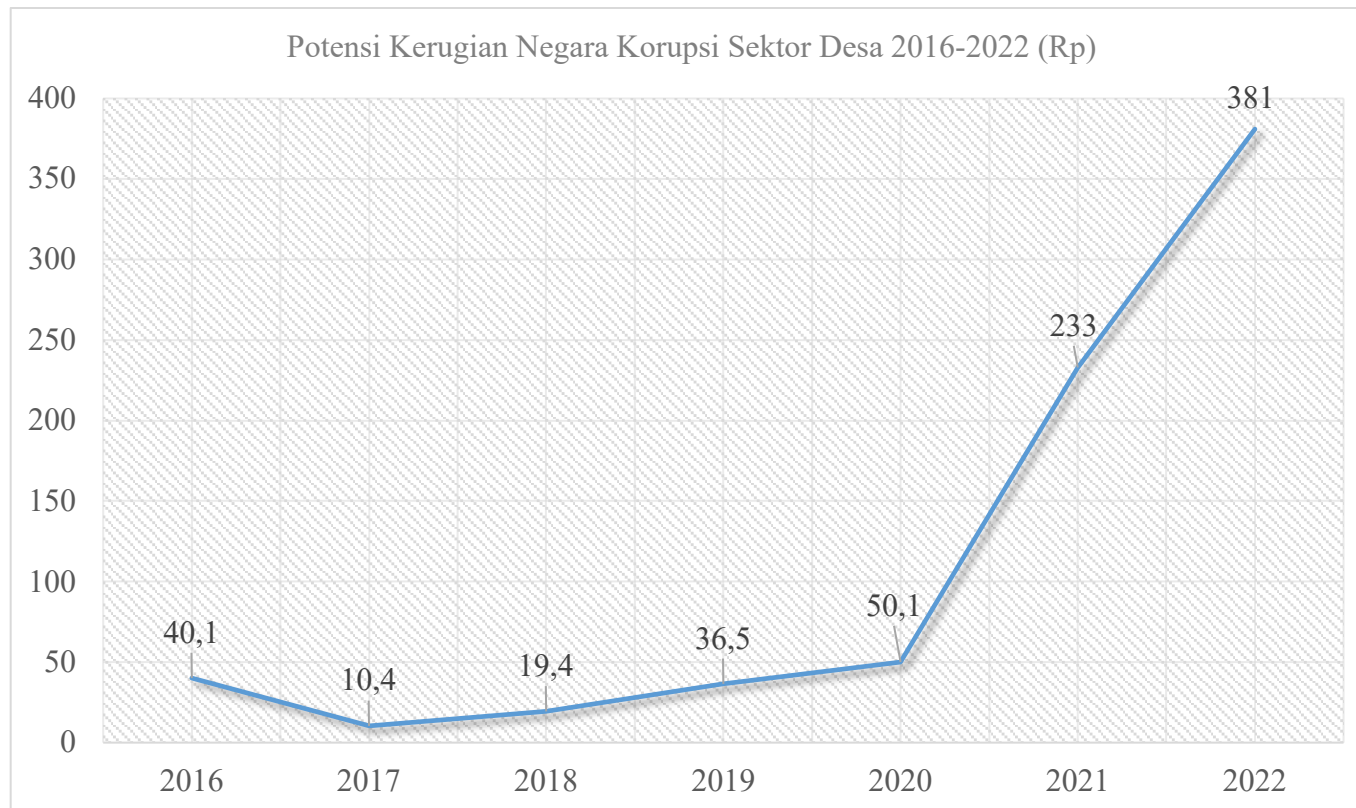
- Aparat penegak hukum paling banyak menangani kasus korupsi di sektor desa, disusul utilitas, dan Pemerintahan;
- Seperti tahun-tahun sebelumnya, sektor-sektor tersebut memang kerap menempati peringkat teratas sebagai domain yang paling banyak ditangani APH

# Korupsi Desa

- Sejak diterbitkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ICW mencatat ada kenaikan yang cukup konsisten terhadap kasus korupsi yang terjadi di Desa



# Potensi Kerugian Negara Sektor Desa 2016-2022



- Besarnya alokasi anggaran desa (Rp 68 Triliun) menjadi tantangan tersendiri dalam konteks pengelolaan;
- Berdasarkan catatan ICW, setidaknya ada lima proses yang menjadi titik celah korupsi;
  1. Proses perencanaan;
  2. Proses pelaksanaan;
  3. Proses pengadaan barang dan jasa dalam konteks penyaluran dan pengelolaan;
  4. Proses Pertanggungjawaban;
  5. Proses monitoring dan evaluasi

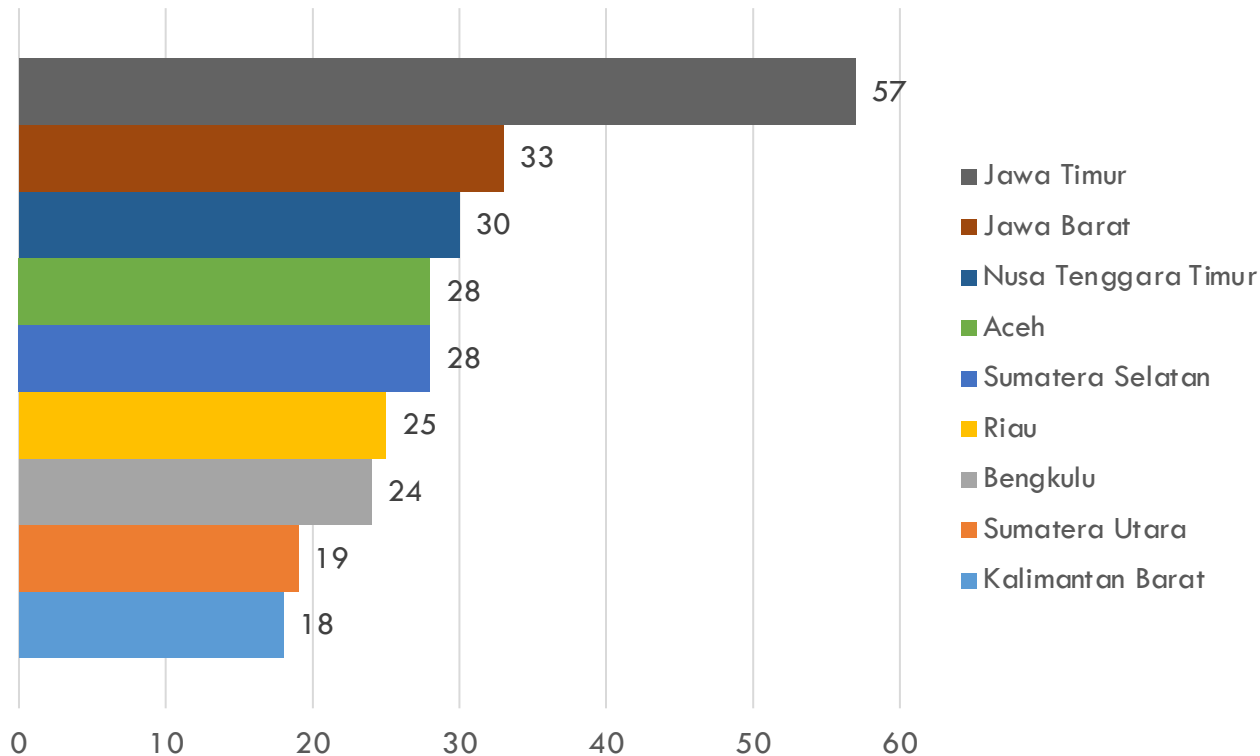


# Korupsi Desa

- Tidak seluruhnya berkaitan dengan dana desa: secara rinci, 133 kasus berkaitan dengan dana desa, sementara 22 kasus berkaitan dengan penerimaan desa
- Pemerintah, khususnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) perlu mengambil langkah konkrit untuk melakukan pencegahan korupsi yang lebih strategis
- Upaya Pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap sektor dana desa melalui Stranas PK sendiri juga patut dipertanyakan



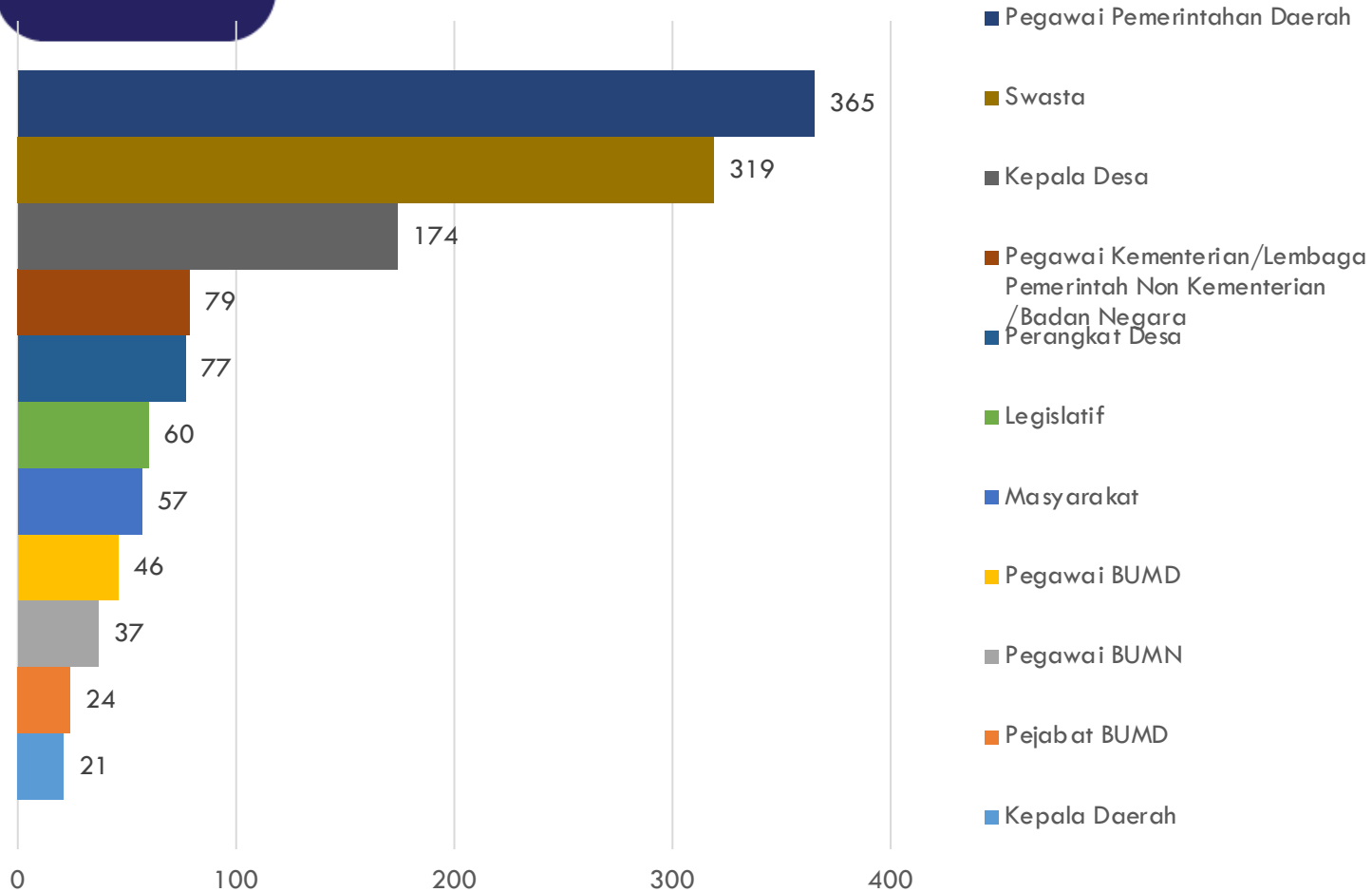
# Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Wilayah Tahun 2022



- Pemetaan terhadap wilayah ini TIDAK serta menunjukkan bahwa daerah tersebut adalah wilayah paling korup;
- Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah yang paling banyak ditangani oleh APH, disusul Jawa Barat, NTT, Aceh, dan Sumatera Selatan
- ICW mencoba melakukan tabulasi silang antara wilayah dan sektor di lima provinsi tersebut, hasilnya 36 kasus ditangani berkaitan dengan sektor desa



# Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Aktor Tahun 2022 (Top 10)



- Aktor yang paling banyak terjerat kasus korupsi adalah Pegawai Pemerintahan Daerah, Swasta, dan Kepala Desa
- Selama tahun tahun 2022, tercatat Kepala Daerah yang ditangani oleh APH sebanyak 21 orang, 18 diantaranya diusut oleh KPK, Kejaksaan 2 orang, dan Kepolisian 1 orang
- Jika dilihat lebih rinci, dari 1.396 tersangka, 506 orang di antaranya berstatus sebagai ASN
- Jumlah korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka adalah sebanyak 6 korporasi (dalam satu kasus) ditangani oleh Kejaksaan Agung.
- Tidak ditemukan informasi mengenai penanganan kasus korupsi korporasi yang dilakukan oleh KPK dan Kepolisian

# Fenomena Jual-Beli Jabatan oleh Kepala Daerah

1. Kewenangan kepala daerah dalam proses promosi dan mutase ASN justru menjadi bancakan untuk praktik jual beli;
2. Praktik jual beli jabatan seperti fenomena gunung es, kasus yang terungkap bisa jadi masih sedikit, namun tidak menutup kemungkinan bahwa masih banyak kasus yang belum terungkap



**Bupati Pemalang – Mukti Agung Wibodwo**



**Walikota Kota Bekasi – Rahmat Effendy**



# Judicial Corruption dan Mafia Peradilan

## 2022 Sejarah Buruk Pengadilan, 2 Hakim Agung Ditahan KPK

Andi Saputra - detikNews

Minggu, 01 Jan 2023 09:41 WIB



Hakim agung Sudrajat Dimiyati (Infografis detikcom/M Fakhry Arrizal)

- Dugaan kasus yang menjerat 2 hakim agung semakin meruntuhkan marwah dunia peradilan
- Pengawasan lembaga kekuasaan kehakiman tidak berjalan dengan baik
- Kontroversi MA berlanjut → Pembatalan PP 99/2012 dan Tren Vonis Rendah Koruptor

# Korupsi Berjamaah Anggota Legislatif



1. Alih-alih menjalankan fungsi pengawasan, anggota DPRD justru turut melakukan praktik korupsi;
2. Akar permasalahan korupsi anggota legislatif ini adalah tingginya biaya politik dan lemahnya pengawasan internal

# Target Kerja dan Anggaran Tahun 2022



Kasus



Rp juta/kasus



Kasus



Rp juta/kasus



Kasus



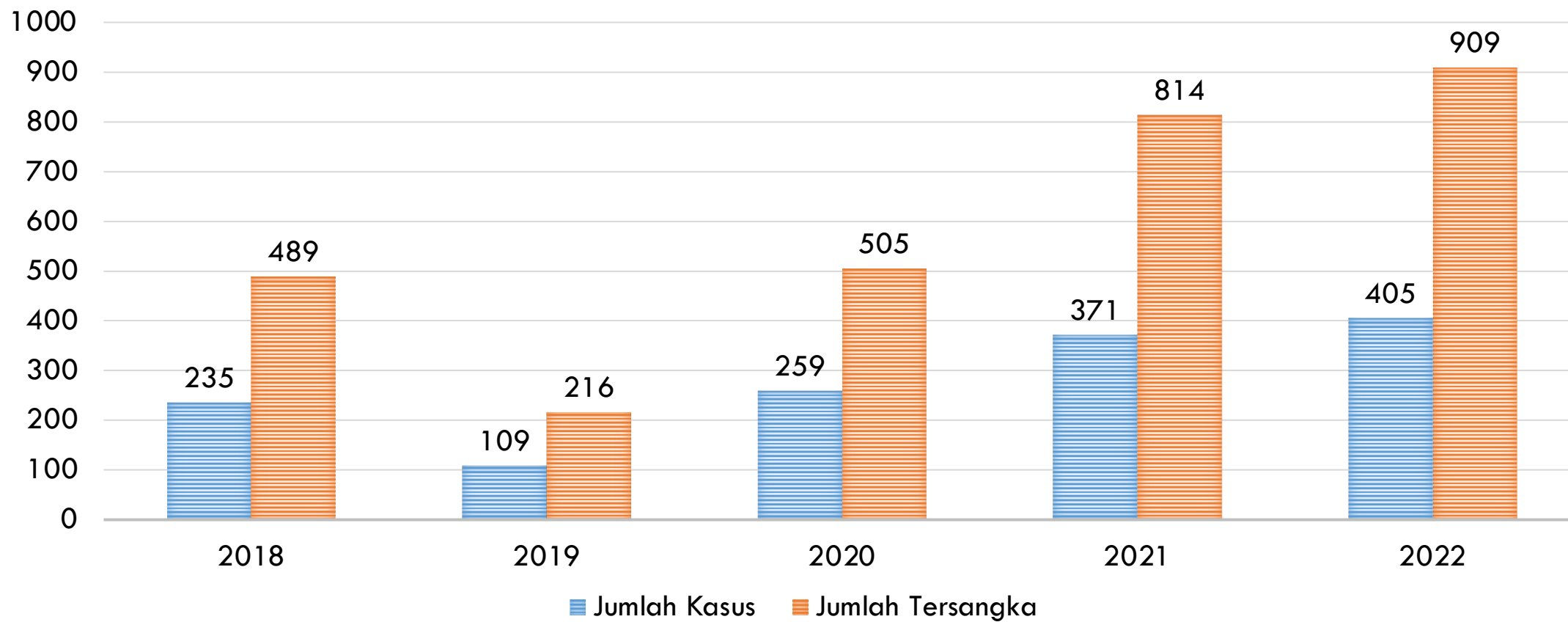
Rp juta/kasus

|                 |      |           |    |       |     |       |
|-----------------|------|-----------|----|-------|-----|-------|
| <b>Nasional</b> | 25   | 217,8     | 40 | 155,1 | 120 | 138,3 |
| <b>Provinsi</b> | 2-47 | 116-1.388 | 2  | 129,8 | N/A |       |
| <b>Kab/Kota</b> | 1-75 | 4,1-640   | 2  | 129,8 |     |       |

# Kinerja Penegak Hukum Tahun 2022

|                                                                                     |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 405 Kasus                                                                         | 138 Kasus                                                                           | 36 kasus                                                                            |
|   | 909 tersangka                                                                     | 307 tersangka                                                                       | 150 tersangka                                                                       |
|  | Rp39.207 triliun                                                                  | Rp1.327 triliun                                                                     | Rp2.212 triliun                                                                     |

# Kejaksaan





### Kuantitas Penanganan Kasus

- Kejaksaan memiliki kantor sebanyak 536 kantor di seluruh Indonesia dengan target penanganan kasus selama 2022 sebanyak 1.027 kasus. Anggaran yang dikelola sebesar Rp138,9 miliar;
- Kejaksaan sepanjang tahun 2022 tercatat hanya menangani sebanyak 405 kasus dengan 909 orang ditetapkan sebagai tersangka;
- Kejaksaan mencatatkan kinerja yang baik, sebab hampir di seluruh provinsi menangani rata-rata 3 kasus

### Kualitas Penanganan Kasus

- Institusi Kejaksaan mengalami peningkatan kinerja yang cukup positif dari sisi kualitas penanganan kasus, dimana terdapat beberapa kasus yang ditangani menimbulkan potensi kerugian negara yang sangat fantastis
- Nilai kerugian negara dari kasus yang ditangani oleh Kejaksaan menjadi yang terbesar selama 2022 ketimbang institusi lainnya, yakni Rp 39.207 triliun.
- Namun hal ini tidak dapat serta merta menjadi suatu pencapaian karena Kejaksaan harus memastikan bahwa nilai kerugian sebesar itu harus kembali kepada kas negara.
- Dari 405 kasus yang diusut, 376 kasus atau 93% mengenakan pasal 2 dan/atau pasal 3 UU Tipikor. Sementara hanya ada 5 kasus yang dikenakan pasal pencucian uang



### Aktor Korupsi

- Aktor yang diusut oleh Kejaksaan tersebut di atas, korps Adhyaksa terpantau belum melakukan pendekatan terhadap kasus-kasus yang melibatkan pelaku dengan kategori *high profile*
- Perlu ada peningkatan kinerja dengan menekankan adanya koordinasi dan supervisi dari Jampidsus, Kejaksaan Agung kepada satuan kerja kejaksaan di tingkat provinsi, kabupaten/kota



# Kasus dengan Potensi Kerugian Negara Fantastis

- Dengan potensi nilai kerugian yang besar, Kejaksaan perlu memastikan bahwa pengembalian hasil kejahatan dapat dikembalikan ke kas negara melalui fungsi penuntutan;
- Preseden buruk mengenai pengembalian aset hasil kejahatan setidaknya dapat dilihat dari hasil pemantauan tren vonis ICW pada tahun 2021 yang menunjukkan dari Rp 62 Triliun, hanya Rp 1,4 Triliun yang kembali ke kas negara
- Rendahnya pengenaan pasal pencucian uang menjadi salah satu penyebab rendahnya pengembalian aset kejahatan

PEMBERANTASAN KORUPSI

## ICW Sebut Hanya 2,2 Persen Kerugian Negara Berhasil Dikembalikan

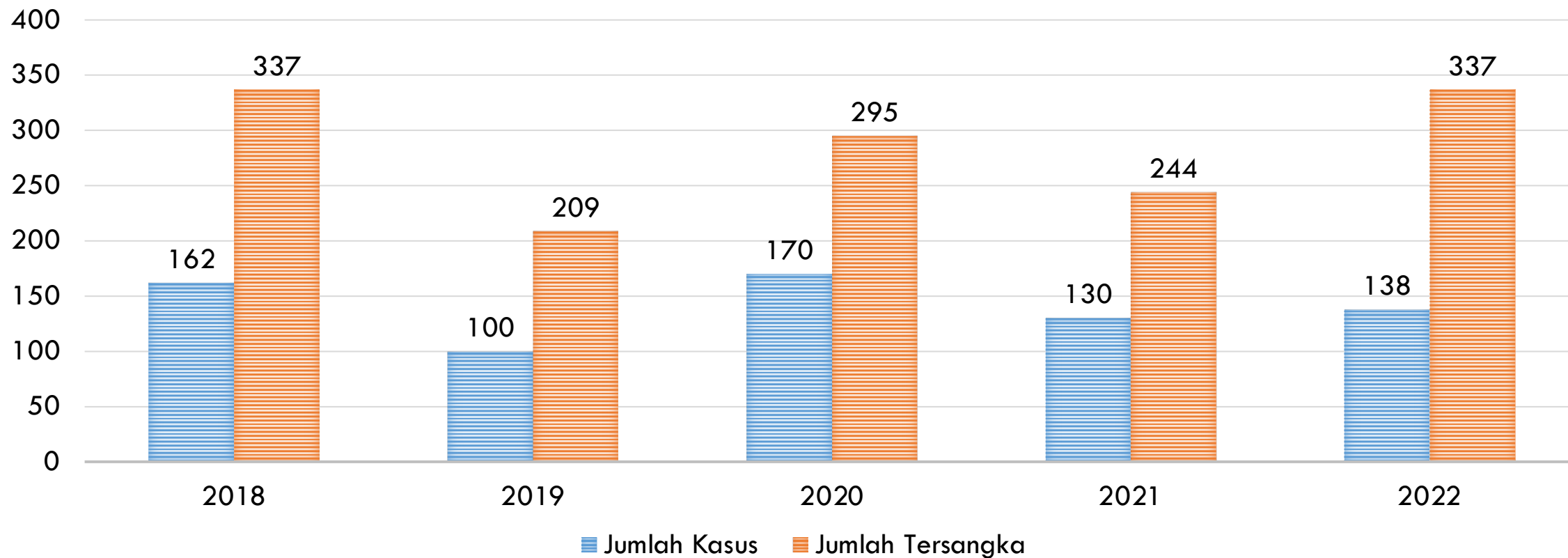
Sepanjang tahun 2021, kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 62,9 triliun. Namun, hanya Rp 1,4 triliun yang berhasil dikembalikan kepada negara.

Oleh SUSANA RITA KUMALASANTI  
22 Mei 2022 22:19 WIB · 6 menit baca

A TEKS ▾      



# Kepolisian







### Kuantitas Penanganan Kasus

- Penanganan kasus korupsi di Kepolisian semakin menurun dibandingkan dengan tahun –tahun sebelumnya
- Kepolisian memiliki 511 kantor. Target penanganan kasus korupsi selama 2022 sebanyak 1.625 perkara dengan anggaran sebesar Rp291,7 miliar.
- Kepolisian hanya mampu menyelesaikan 138 kasus dengan 337 orang ditetapkan sebagai tersangka (perkara)
- Ada sejumlah satuan kerja kepolisian di daerah yang diduga tidak menangani kasus korupsi sepanjang tahun 2022

### Kualitas Penanganan Kasus

- Pasal yang banyak digunakan Kepolisian dalam menjerat pelaku adalah pasal Kerugian Negara yakni sebanyak 125 kasus atau 91% dari 138 kasus yang ditangani dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 1,3 Triliun
- Janji Kapolri Listyo Sigit yang pada saat *fit and proper test* menegaskan akan memaksimalkan pemulihan aset dalam kasus korupsi.
- Selain itu, pada bulan Februari 2021 lalu, Kapolri meningkatkan kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai upaya agar lembaganya mampu mengoptimalkan *asset recovery* dalam kasus tindak pidana ekonomi
- Namun kenyataannya kepolisian hanya sebanyak 4 kali menerapkan instrument pasal pencucian

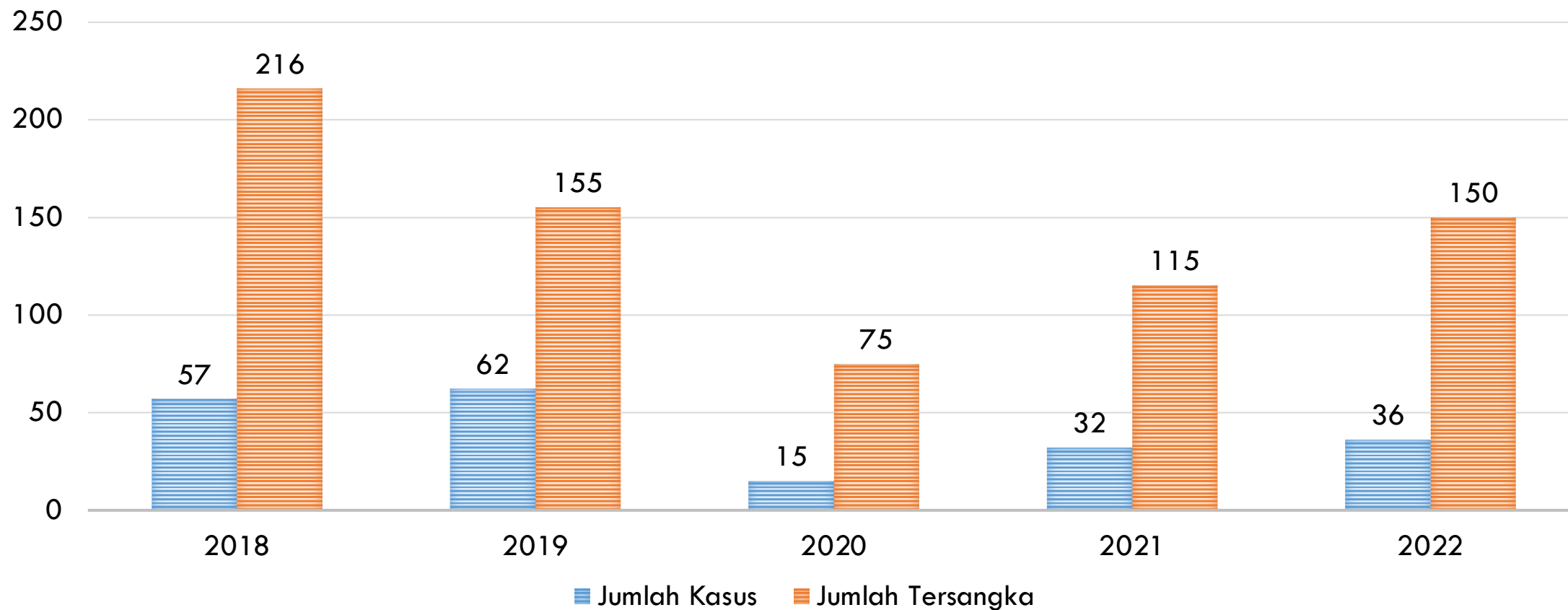
### Aktor Korupsi

- Dengan sumber daya yang melimpah dari segi anggaran maupun personil ketimbang Kejaksaan dan KPK, kinerja Kepolisian justru lebih buruk, terutama dalam melakukan penindakan dalam kasus besar;
- Tidak ada upaya dari Kepolisian untuk membongkar kasus pada aktor yang paling strategis.





# Komisi Pemberantasan Korupsi





### **Kuantitas Penanganan Kasus**

- Kerja KPK selama tahun 2022 mengalami stagnans baik dari segi jumlah kasus maupun jumlah tersangka;
- KPK berhasil menangani sebanyak 36 kasus dan 150 orang tersangka

### **Kualitas Penanganan Kasus**

- KPK telah memiliki visi untuk mengungkap kasus korupsi hingga ke aktor strategis, seperti kepala daerah bahkan hakim agung
- Tidak ada korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK
- Berbeda dengan Kejaksaan dan Kepolisian, KPK paling dominan menggunakan pasal suap dalam menangani perkara selama tahun 2022, yakni 26 dari 36 kasus



### **Profesionalisme Penindakan Kasus Korupsi**

- Fungsi supervisi penindakan KPK tidak berjalan maksimal, KPK terlihat hanya fokus pada pencegahan
- Pasifnya kerja supervisi KPK ini bertolak belakang dengan semangat KPK ketika meminta pengesahan PerPres 102/2020 tentang supervisi pemberantasan korupsi
- Revisi UU KPK dan pimpinan kontroversial menjadi faktor buruknya tren penindakan kasus korupsi KPK

# Permasalahan SDM KPK

Tercatat dalam laporan akhir tahun 2021, KPK memiliki 1.551 personil, 272 diantaranya di direktorat Penindakan dan Eksekusi

## KPK Pecat 57 Pegawai per 30 September, Ini Daftar Lengkapnya

Reporter Editor  
M Rosseno Aji Aditya Budiman

Kamis, 16 September 2021 06:32 WIB



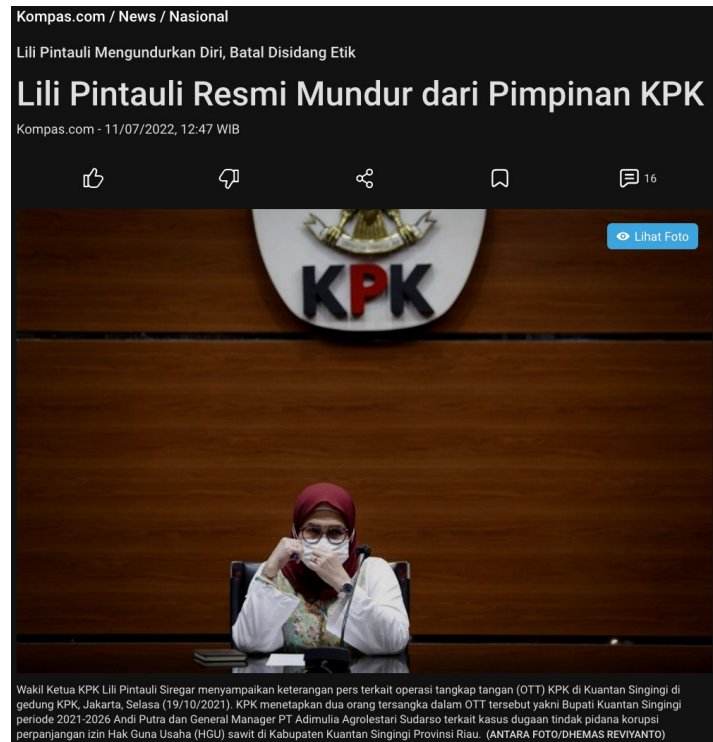
> BERITA > NASIONAL

## Ketua KPK Curhat ke Jokowi: Kurang Personel dan Markas di Daerah

Kamis, 9 Desember 2021 - 13:35 WIB

Oleh : Bayu Nugraha, Edwin Firdaus





Kontroversi pimpinan KPK semakin menggambarkan mengapa kinerja pemberantasan korupsi mengalami stagnansi





# Rekomendasi

## **Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK)**

- Kerja-kerja penindakan yang berkaitan dengan penyidikan kasus korupsi oleh setiap APH harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan mengedepankan akuntabilitas dengan cara menyampaikan informasi terkait dengan penanganan perkara secara berkala dalam kanal informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan mandat dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Setiap APH harus lebih aktif untuk memaksimalkan upaya pemulihan aset hasil kejahatan dengan cara memaksimalkan forum uji pembuktian dan penelusuran aset hasil kejahatan melalui penggunaan pasal TPPU;
- APH dan PPATK perlu membangun sinergi yang baik guna mendorong optimalisasi penelusuran aset hasil kejahatan tindak pidana korupsi
- Setiap aparat penegak hukum perlu melakukan evaluasi dan peningkatan kapasitas secara berkala bagi para penyidiknya agar penindakan kasus korupsi dapat berjalan lebih efektif

# Rekomendasi

## Pemerintah dan DPR

- Pemerintah dan DPR harus memprioritaskan proses legislasi dengan segera mengesahkan sejumlah regulasi antikorupsi seperti RUU Perampasan Aset, RUU Pembatasan Transaksi Uang Tunai dan Revisi UU Tindak Pidana Korupsi guna menunjang kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh APH;
- Pemerintah yang secara administratif merupakan atasan setiap APH harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap pimpinan APH dengan mendasarkan kinerja penindakan kasus korupsi;
- DPR yang memiliki fungsi anggaran harus memangkas pagu anggaran aparat penegak hukum yang terbukti kinerjanya buruk dalam menangani kasus korupsi

**TERIMA KASIH**

